



KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA

SERTIFIKAT PELATIHAN

NOMOR: SDM-SM.02.03-010120

Kementerian Hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, serta ketentuan pelaksanaannya menyatakan bahwa:



Nama : Sarah Amalia Nursani, S.H.
NIP : 199511182019012001
Tempat/ Tanggal Lahir : Jakarta, 18 November 1995
Pangkat/Golongan Ruang : Penata Muda Tk.I, III/b
Jabatan : Analis Hukum Ahli Pertama
Instansi/Unit Kerja : Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual
Kualifikasi : MEMUASKAN

LULUS

pada Pelatihan Teknis Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Penyusunan Peraturan Kebijakan Angkatan I Tahun Anggaran 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dari tanggal 23 Februari 2026 sampai dengan tanggal 6 Maret 2026 di Depok yang meliputi 59 jam pelajaran.

Depok, 6 Maret 2026
Kepala Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Hukum,

Gusti Ayu Putu Suwardani

DAFTAR MATA PELATIHAN

1. Ceramah: Pembinaan Ideologi Pancasila (2 OJ)
2. Ceramah: Konsep Dasar HAM (2 OJ)
3. Kebijakan Pengembangan SDM dan Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila Internalisasi Nilai-nilai Pancasila (3 JP)
4. Overview: Pelatihan Teknis Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Penyusunan Peraturan Kebijakan bagi Analis Hukum (3 JP)
5. Dinamika Kelompok/*Building Learning Commitment (BLC)* (3 OJ)
6. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Penyusunan Peraturan Kebijakan dalam perspektif HAM (3 JP)
7. Prinsip-prinsip Regulasi dalam Perspektif Perlindungan Kekayaan Intelektual (3 JP)
8. Proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (4 JP)
9. Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Kebijakan (Legislasi Semu) (4 JP)
10. Pengharmonisasian Peraturan Perundang-undangan (3 JP)
11. Perumusan Norma (4 JP)
12. Teknik Penyusunan PUU I (Kerangka Peraturan Perundang-undangan) (4 JP)
13. Teknik Penyusunan PUU II (Hal-hal Khusus) (4 JP)
14. Teknik Penyusunan PUU III (Ragam Bahasa Peraturan Perundang-undangan) (4 JP)
15. Teknik Pelaksanaan Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan (5 JP)
16. Pengawasan Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan Tugas dan Fungsi Instansi Pemerintah (4 JP)
17. Pengujian Peraturan Perundang-undangan (4 JP)

Depok, 6 Maret 2026
Kepala Pusat Pengembangan
Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan,

Mutia Farida